

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. (2020). *EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH*.
- Angeliyana, A., Faathir, H., Aziiz, A., & Halimatus, H. (2021). *Sinergisitas Desa dalam Optimalisasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-dd) di Desa Batujajar Barat*. 2(November).
- Anjela, R. (2019). *Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Kampar*.
- Arumdani, N., Rahmania, S. N., & Tukiman, Z. N. (2021). *EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLTDD) DI DESA MOJORUNTUT KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO*. 2(5), 6.
- Baderan, U. S., & Karim, D. F. (2021). *Effectiveness of Direct Cash Aid Distribution During the Covid-19 Pandemic in Makmur Abadi Village , Tolangohula District , Gorontalo Regency*. 1(2), 33–38.
- Danial, E., & Wasriah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah (2009)*. Bandung: Laboraturium Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Fawzi, N. I., & Husna, V. N. (2021). *Pemanfaatan Informasi Geospasial Untuk Ketahanan Pangan Saat Pandemi Covid-19. Seminar Nasional Geomatika, 19*, 1. <https://doi.org/10.24895/sng.2020.0-0.1114>
- Gie, L. (2016). *Ensiklopedia Administrasi*.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Bumi Aksara.
- Hastuti, P. (2018). *Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara*, 785–787.
- Kementerian Desa. (2020a). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020. PDTT, Pemendes, 16*, 32.
- Kementerian Desa. (2020b). *permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang*

Perubahan Ketiga atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 1–24.

Kementerian Keuangan. (2021). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/PMK.07/2020.* 8.

Khoiriah, S., & Meylina, U. (2018). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>

Mahi, R. (2001). Fiscal Decentralization: Its Impact on Cities Growth. In *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* (Vol. 2, Issue 1, pp. 1–20). <https://doi.org/10.21002/jepi.v2i1.616>

Mamonto, F. H., Wawointana, T., & Moningka, G. E. (2021). Policy Implementation Direct Cash Assistance Program in Corona Virus Disease (COVID-19) in Tondegesan Village Kawangkoan Sub District. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 10(1), 126. <https://doi.org/10.31314/pjia.10.1.126-138.2021>

Maun, C. E. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.

Moleong, J. L. (2002). *Metodologi Penelitian*.

Nugroho, A. B. (2022). *Wawancara dengan Narasumber 6 Mei 2022-Proses Pelaksanaan BLT-DD di Desa Temon.*

Pasolong, H. (2018). *Teori Administrasi Publik*. 10–27.

Pemerintah Desa Temon. (2020). *Peraturan Desa Temon Nomor 9 Tahun 2021.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2020a). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2020b). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.*

- Rachaju, K. (2021). *Effectiveness of Cash Assistance (BLT) for Communities Affected by The Pandemic Covid-19: Case study in Sirnajaya village, Cibadak sub-district, Sukabumi district*. 11(1), 320–330. www.legal.isha.or.id/index.php/legal
- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>
- Subagyo, A. W. (2000). *Efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan : Studi kasus di Kabupaten Kediri Jawa Timur*.
- Suparman, N. (2021). Kebijakan Penanggulangan Bencana: Model Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Sekolah/ Madrasah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 29. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3393>
- Susanto, E. H. (2009). *KOMUNIKASI POLITIK DAN OTONOMI DAERAH*. 162.
- Yudhanto, Y., Ardhi, O. D. W., & Purbayu, A. (2017). Perancangan Dan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Desa (Simda). *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia 2017*, 1–6.
- Zulfida, I., & Samah, E. (2018). *Transparansi penggunaan dana desa*. April.